

Volume 1 No. 9 Agustus Thn 2019

ISSN : 2354-5925

BIROKRAT

JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan
Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros
Maharani Asmaniar dan Muhammad Guntur

Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) dan Kepatuhan
Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara
A.Dian Ade Erfina dan Muhammad Guntur

Efektivitas Program Pelayanan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Lihureng Kabupaten Bone
Reski Fatmala dan Fakhri Kahar

Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi di Kantor Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa)
Nursan dan Fakhri Kahar

Implementasi Aplikasi Online Elektronik-Office Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(e-DJPB) Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn) Makassar II
Yuni Amiliyani dan Herlina Sakawati

Evaluasi Program Makassar Bersih Lorong (Mabello)
Dan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Manggala Kota Makassar
Ramlawati dan Herlina Sakawati

Peranan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa dalam Mengantisipasi
Arah Sesat (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa)
Andini Azis dan Muh. Nur Yamin

Evaluasi Program Lisa dalam Makassar Tidak Rantasa
di Kecamatan Rappocini Kota Makassar
Latang dan Muh. Nur Yamin

Implementasi Program Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Sawakong
Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar
Hasbudianto dan Aslinda

Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
di Kecamatan Tamalate Kota Makassar
Arwiny Ramadhani dan Aslinda



Diterbitkan Oleh :
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar

JURNAL BIROKRAT ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Volume 1 No. 9 / Agustus 2019, ISSN: 2354-5925

Terbit tiga kali setahun pada bulan April, Agustus, Desember. Berisi tulisan ilmiah dalam bentuk hasil-hasil kajian analisis, penelitian, aplikasi, teori tentang masalah masalah administrasi publik. Penerbitan junal ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta menyebarkan kajian administrasi publik, disamping sebagai wahana komunikasi intra para dosen, praktisi, dan pemerhati masalah-masalah administrasi publik.

JURNAL BIROKRAT ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik

PENERBIT

Prodi Ilmu Administrasi Negara FIS UNM

DEWAN REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M.Hum.

Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si.

Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si.

Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si.

Dr. Hj. Aslinda M.Si.

PEMIMPIN UMUM

Dr. Muhammad Nur Yamin M.Si

KETUA PELAKSANA

Ismail, S.Pd.,M.Si.

WAKIL KETUA

Sulmiah, S.Pd.,M.A.P

PENYUNTING AHLI

Prof. Dr. H. Hedar Akib M.Si

Dr. Risma Niswanti, SS, M.Si

Dr. Andi Cudai Nur M.Si

STAF SEKRETARIAT

Muh.Lutfi Siraj, S.Pd.,M.pd

Novayanti S Rukmana, S.Sos, M.Si

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FIS Universitas Negeri Makassar Kampus UNM
Gunungsari Baru, Makassar, Telp. (0411) 5392333, Call Center: 081355091979, Email:
injurytime79@gmail.com Website: ian.unm.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Peran Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros Maharani Asmaniar dan Muhammad Guntur	1-10
2. Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara A. Dian Ade Erfina dan Muhammad Guntur	11-19
3. Efektivitas Program Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Libureng Kabupaten Bone Reski Fatmala dan Fakhri Kahar	20-33
4. Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Pegawai (Studi di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa) Nursan dan Fakhri Kahar	34-44
5. Implementasi Aplikasi Online Elektronik-Office Direktorat Jenderal Perbendaharaan (e-DJPB) di Kantor Peayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II Yuni Amiliyani dan Herlina Sakawati	45-60
6. Evaluasi Program Makassar Bersih Lorong (Mabello) dan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Manggala Kota Makassar Ramlawati dan Herlina Sakawati	61-75
7. Peranan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa dalam Mengantisipasi Aliran Sesat (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa) Andini Azis dan Muh. Nur Yamin	76-98
8. Evaluasi Program Lisa dalam Makassar tidak Rantasa di Kecamatan Rappocini Kota Makassar Latang dan Muh. Nur Yamin	99-114
9. Implementasi Program Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Hasbudianto dan Andi Aslinda	115-127
10. Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar Arwiny Ramadhani dan Andi Aslinda	128-142

EVALUASI PROGRAM LISA DALAM MAKASSAR TIDAK RANTASA DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR

Latang

Mahasiswa Program studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Muhammad Nur Yamin

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar
Email: Nuryamin1@gmail.com

ABSTRAK

Evaluasi Program Lihat Sampah Ambil (LISA) dalam Gerakan Makassar Tidak Rantasa di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Bapak Muhammad Nur Yamin, dan Bapak Haedar Akib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Program Lisa dalam Makassar Tidak Rantasa Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Program Lihat Sampah Ambil (LISA) dalam Makassar tidak rantasa di kecamatan Rappocini Kota Makassar dapat dilihat dari enam indikator evaluasi kebijakan yaitu: 1) Efektivitas hasil yang diperoleh kurang baik disebabkan karena masih adanya masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, 2) Efisiensi hasil yang diperoleh dapat diukur dari sub indikator biaya yang disediakan pemerintah yang cukup, merata 3) Kecukupan hasil yang diperoleh cukup baik dalam hal pengadaan tempat sampah, 4) Pemerataan hasil yang diperoleh cukup baik dalam hal pemerataan biaya retribusi persampahan, 5) Responsivitas hasil yang diperoleh kurang baik dalam hal respon masyarakat yang belum sepenuhnya sadar dalam menjaga kebersihan dan, 6) Ketepatan hasil yang diperoleh dalam hal ini ketepatan sasaran program lisa ini sudah tepat sasaran kepada masyarakat. Hasil penelitian enam indikator menunjukkan bahwa Program Lihat Sampah Ambil dalam Makassar tidak rantasa ini sudah memberikan perubahan kepada masyarakat dengan Program Lihat Sampah Ambil (LISA) yang merubah pola pikir masyarakat yang peduli terhadap sampah, Tetapi perubahan itu belum maksimal. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada 4 indikator yang sudah baik yaitu Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Ketepatan dan Responsivitas sedangkan ada 2 indikator yang kurang baik yaitu Efektivitas dan Ketepatan. Rekomendasi dari Penelitian diwajibkan seluruh pegawai Kota Makassar dalam Program Lihat Sampah Ambil (LISA) ini harus dibudayakan dimanapun kita berada serta pemerintah diharapkan terus mensosialisasikan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Evaluasi, Program, (LISA).

1. Latar Belakang

Kota besar adalah simbol kemajuan dan keberhasilan pembangunan dari berbagai aktivitas ekonomi, perdagangan maupun pendidikan, sehingga memberikan konsekuensi bahwa sebagian besar kegiatan manusia berada di perkotaan, bahkan menjadi semakin banyak pendatang yang menambah permasalahan kota sehingga menjadi semakin kompleks. Salah satunya masalah kebersihan karena kurangnya kesadaran masyarakat, maka Walikota Makassar periode tahun 2014-2019 menciptakan berbagai kebijakan atau program-program guna mengatasi masalah kebersihan, keasrian dengan istilah MTR (Makassar Tidak Rantasa)

Data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Makassar Tahun 2014 tercatat 1.3 juta jiwa dimana dalam sehari volume sampah yang terangkut oleh 447 truk sampah milik Dinas Kebersihan dan sebanyak 700 - 800 ton. Jumlah itu belum termasuk yang diolah oleh masyarakat melalui bank sampah, dibakar dan sebagainya. Untuk itu, Pemerintah Kota Makassar mensosialisasikan Program Makassar ta' Tidak Rantasa sebagai kebijakan dari Pemerintah yang merupakan bentuk realisasi dari visi Walikota yaitu Kota Makassar menjadi Kota Dunia yang nyaman untuk semua.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah menegaskan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu

dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien. Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan menghadapi banyak karakter atau perilaku masyarakat yang beragam. Perilaku masyarakat perkotaan yang relatif berbeda dalam menyikapi masalah. melakukan inovasi-inovasi dalam menangani masalah kebersihan Kota Makassar dengan mencoba merekonstruksi pemikiran masyarakat untuk cinta dan peduli terhadap kebersihan.

Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Walikota Makassar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.2/1087/Kept/V/2014 Tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa. Setiap SKPD di Kota Makassar memiliki 2-3 kelurahan yang menjadi wilayah binaan. Pembagian wilayah kerja ini dibuat agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan.⁸¹ Sasaran atau tujuan dari pelaksanaan Program Gemar Makassar Tidak Rantasa (Gemar MTR) dapat diketahui dari tujuan program dimana tujuan dari sasaran pelaksanaan tersebut telah tercapai atau belum tercapai maka dapat ditinjau dari kegiatan Program Gemar MTR merupakan program pencanangan cinta akan kebersihan. Program ini

⁸¹ Surat Keputusan Nomor 660.2/1087/Kept/V/2014 Tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan

diharapkan bisa merubah pola pikir masyarakat yang dulunya sering membuang sampah sembarang tempat dapat berubah menjadi hidup bersih dan lingkungan Kota dapat terbebas dari masalah persampahan. Jargon pendukung Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa yang digunakan adalah LISA (Lihat Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong), MABASA (Makassar Bebas Sampah) dan Aku dan Sekolahku Tidak Rantasa. Ke empat jargon ini digunakan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam merubah pola pikir masyarakat untuk cinta kerbersihan.

Keberadaan sebuah program sebagai instrumen pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya dapat dilihat dari tinjauan manajemen strategik bahwa program merupakan turunan yang berkesinambungan dari visi dan misi pemerintah daerah dimana hal tersebut memiliki tujuan sasaran, dan kebijakan yang didesain sedemikian rupa sehingga melahirkan program dan kegiatan sehingga dapat diasumsikan bahwa keberhasilan program dapat dilihat dari kesinambungan strumen-istrumen tersebut melalui langkah evaluasi kebijakan.

Hasil penelitian tahun 2016 Haerul, Haedar Akib dan Hamdan, dengan judul "Implementasi Kebijakan Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar", menunjukkan bahwa dampak dari program Makassar Tidak Rantasa (MTR) Sudah memberikan perubahan pola kehidupan masyarakat Kota Makassar

Khususnya di Kecamatan Tamalate dengan adanya Program Bank sampah, Gerakan LISA (Liat Sampah Ambil) dan Gerakan LONGGAR (Lorong Garden), akan tetapi perubahan itu belum maksimal program dan komitmen perubahan sikap terhadap kebersihan lingkungan.⁸²

Selaian itu penelitian juga dilakukan oleh Novri Ardi Wiranata Nur tahun 2014 dengan judul "Analisis Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa di Kota Makassar", menunjukkan bahwa Program Gerakan Makassar Tidak Rntasa melihat sisi partisipasi masyarakat belum ada peningkatan secara signifikan, masih terlihat masyarakat seandainya membuang sampah, sisa makanan dan minuman disembarang tempat meskipun telah tersedia tempat-tempat sampah di sekitaran area tersebut, begitupun papan pengumuman "Buang Sampah Pada Tempat Sampah" atau Jagalah Kebersihan" masih sangat minim di tempat umum.⁸³

Masalah sampah bukan masalah yang mudah ditangani oleh pemerintah Kota Makassar, dalam mengatasi masalah kebersihan, pemerintah Kota (Pemkot) Makassar

⁸² Haerul, Haedar Akib, Hamdan. 2016. *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar*. Makassar: Jurnal. Administrasi Publik. Vol. 6, No.2.

⁸³ Indriyani,Dwi, Lukman. 2015. *Analisis Pelaksanaan Program Gerakana Makassar Ta' Tidak Rantasa Di Kota Makassar*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Politik Uniersitas Hasanuddin.

mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan “Makassar Tidak Rantasa”. Kebijakan Makassar tidak Rantasa merupakan kebijakan yang mengatur tentang tata kebersihan Kota dimulai dari kesadaran semua warga Kota Makassar untuk mengedepankan aspek kebersihan tentang sampah. Kedua Hasil penelitian menggambarkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan (*Das Sollen and Das Sein*) dalam proses pelaksanaan kebersihan. Program Makassar Tidak Rantasa ini belum terlaksana dengan baik disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari program Makassar Tidak Rantasa dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengavaluasi program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Evaluasi Pelaksanaan Program Lihat Sampah Ambil (LISA) dalam Makassar Tidak Rantasa Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar ?
- 2) Bagaimanakah dampak pelaksanaan Program Lihat Sampah Ambil (LISA) Dalam Makassar Tidak Rantasa Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar?

3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program Lihat Sampah Ambil (LISA) dalam Makassar Tidak Rantasa Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
- 2) Untuk Mengetahui dampak pelaksanaan Program Lihat Sampah Ambil (LISA) Dalam Makassar Tidak Rantasa Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah, pengembangan wawasan dan pengetahuan serta referensi bagi penelitian masalah. Program Lihat Sampah Ambil (LISA) dalam Makassar Tidak Rantasa Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
- 2) Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Makassar, selanjutnya dapat diupayakan kebijakan-kebijakan yang dapat menangani masalah Persampahan di Kota Makassar

5. Konsep Kebijakan

1) Konsep Dasar Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi atau unit kerja dalam

melakukan tugas dan fungsi tentang dibebankan kepadanya.

Menurut Jones dalam Nawawi (2009: 155) Evaluasi suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan proses pemerintahan.⁸⁴ Menurut Nugroho (2006: 155) meskipun evaluasi berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada perumusan dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu lebih dari "Proses" perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya "hanya" menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati.⁸⁵

Menurut Nawawi (2009: 158) dalam melakukan evaluasi kebijakan publik memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Menentukan tingkat kinerja sesuatu kebijakan. Dengan evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah

mengukur berapa besar kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.

4. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mendeteksi serta mengetahui adanya penyimpangan.

2) Tipe dan Pendekatan Evaluasi

Menurut Fenance dalam Badjuri (2003: 135) ada empat dasar tipe evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Evaluasi kecocokan (*appropriateness*) menguji dan mengevaluasi tentang apakah kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan ? apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini ? pertanyaan pokok dalam evaluasi kecocokan ini adalah siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan publik tersebut pemerintah atau sektor swasta ? jawaban atau pertanyaan ini memungkinkan penentuan tingkat kecocokan implementasi kebijakan.
2. Mengevaluasi aktivitas menguji dan menilai apakah program kebijakan tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan ? apakah tujuan yang diapai dapat terwujud ? apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan ? tipe evaluasi ini memfokuskan diri pada

⁸⁴ Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Adokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN (Putra Media Nusantara).

⁸⁵ Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan public untuk Negara-Negara Berkembang Jakarta*: PT. Elex Media Komputindo.

mekanisme pengujian berdasar tujuan yang ingin dicapai yang biasanya secara tertulis tersedia dalam setiap kebijakan public

3. Evaluasi efisiensi, merupakan pengujian dan penilaian berdasarkan tolak ukur ekonomis yaitu apakah input yang digunakan telah digunakan dan hasilnya sebanding dengan output kebijakannya ?apakah cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan ?
4. Meta evaluasi, menguji dan menilai terhadap proses evaluasi itu sendiri. Apakah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga berwenang sudah professional ?apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang memengaruhi pilihan-pilihan manejerial ?

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat *bias* dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2003: 610) mencakup enam indikator sebagai berikut

Tabel 1: Indikator Evaluasi Kebijakan

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	- Unit biaya - Manfaat bersih - Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh	- Biaya tetap

	pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah	- Efektivitas tetap
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	- Kriteria Pareto - Kriteria Kaldor-Hicks - Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survey warga Negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien ⁸⁶

6. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.⁸⁷ Dalam Afrizal (2014: 13) Pemilihan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini sudah sesuai digunakan dalam meneliti program Makassar Tidak Rantasa di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dimana penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan pada saat melakukan penelitian kemudian dianalisa, dan hasil dari analisa tersebut dijadikan bukti-bukti yang perlu diinterpretasi untuk digunakan sebagai pendukung kebenaran yang dilakukan dalam penelitian.

⁸⁶ Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 601

⁸⁷ Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers. Hal 13

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data yang bersumber dari informasi langsung yang berkaitan dengan program Makassar Tidak Rantasa' (MTR) dikota Makassar. Adapun informasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kepala wilayah kecamatan
- 2) Kepala Kelurahan
- 3) Perwakilan RT
- 4) Perwakilan RW
- 5) Masyarakat

Data sekunder yaitu sebagai data pelengkap yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen-dokumen buku tes yang ada pada kantor kecamatan diwilayah Makassar atau dari sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas yaitu Makassar Tidak Rantasa' (MTR) dikota Makassar.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menggunakan model intraktif menurut Melles, Huberman dan saldana dalam Sugiyono (2018:246-253) Meliputi:

- 1) Data Condensation (Kondensasi Data)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, penyerdehanaan, mengabstrasikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Makna dari kondensasi mengacu pada pengetahuan data. Dalam model sebelumnya menggunakan istilah reduksi yang berarti mengurangi data dalam kondensasi data tidak dihilangkan melainkan dirangkum, diparafase, maupun digabungkan dengan data lainnya. Kondensasi data dalam penelitian

ini dilakukan melalui merangkum hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sesuai dengan masing-masing aspek. Data hasil rangkuman kemudian dipakai sebagai data penelitian.

- 2) Data Display (Penyajian Data)

Setelah data kondensasi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Teks yang bersifat naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penyajian data kualitatif. Meskipun begitu untuk mempermudah dalam penarikan penyajian data diharapkan dalam bentuk matriks, grafis, diagram, maupun pemetaan. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk teks naratif, serta table pada suatu aspek.

- 3) Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/Data Verifikasi)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan di ambil dari data yang terkumpul kemudian diverifikasi terus menerus selama proses penelitian berlangsung agar data yang didapat terjamin keabsahan dan objektivitasnya, sehingga kesimpulan terakhir dapat dipertanggung jawabkan.⁸⁸

7. Penyajian Data dan Hasil Penelitian

Mewujudkan Program Makassar Tidak Rantasa dalam hal

⁸⁸ Sugiyono. 2018. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Hal 246-253

Program LISA (Lihat Sampah Ambil) merupakan salah satu cara menciptakan kesadaran masyarakat apabila melihat sampah di sekitarnya. Masyarakat dalam hal ini dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melihat bagaimana respon masyarakat ketika melihat ada sampah di sekitarnya. Program LISA (Lihat Sampah Ambil) ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat bagaimana pentingnya menjaga lingkungan yang terbebas dari sampah.

Hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar terhadap 5 Informan dengan menggunakan metode wawancara sebagai alat pengumpulan data yang paling utama. Dari kelima informan tersebut bernama yaitu Bapak Abdul Haris S.sos, Ibu Ernawati S.sos, M.Ap, Bapak M. Yahya AB, Bapak Anto, dan Ibu Nanna Terpilihnya kelima nama di atas, sebagai informan dalam penelitian ini karena peneliti melihat bahwasanya informan-informan tersebut dianggap mempunyai kapabilitas dalam memberikan jawaban tentang penelitian ini.

Penyajian data wawancara yang terkait Program Lihat Sampah Ambil (LISA) dalam Makassar Tidak Rantasa di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dinilai berdasarkan beberapa fokus penelitian menurut William N Dunn yang terdiri dari : Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan, Ketepatan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan secara terperinci

berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Efektifitas (*effectiveness*) yaitu menentukan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai melalui program Lihat Sampah Ambil (LISA) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Dapat diartikan bahwa efektifitas adalah sejauh mana dapat pencapaian tujuan pada waktu yang tepat, dalam seperti pelaksanaan tugas pokok, maka ukuran efektifitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa program Lisa dalam Makassar Tidak Rantasa ini merupakan salah satu cara menertipkan masyarakat dan mengubah pola perilaku masyarakat yang tak peduli dengan lingkungannya, Walaupun masih ada sekelompok masyarakat akan tak peduli masalah kebersihan (membuang sampah di sembarang tempat)

2. Efisiensi (*efficiency*) yaitu menentukan sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dan dapat diukur dari sub indikator biaya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu serta tenaga yang dikeluarkan dalam pencapaian suatu program lihat sampah ambil (LISA) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa program Lisa dalam Makassar Tidak Rantasa ini merupakan salah satu cara efisien Walikota Makassar untuk mengajak semua masyarakat agar peduli terhadap lingkungan yang terbebas dari sampah. Program Lisa juga ini diterapkan kepada seluruh masyarakat dimana pun dia berada harus tetap menjaga kebersihan.

3. Kecukupan (*adequacy*) yaitu menentukan sejauh mana hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah lihat sampah ambil (LISA) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dalam hal ini sebelum suatu program kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang ingin dicapai, apakah acaranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaan yang benar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kecukupan dalam program Lisa sudah berjalan baik di masyarakat dan dari pihak Kecamatan sendiri juga menyediakan fasilitas kendaraan yang mengambil sampah dari rumah ke rumah.

4. Pemerataan (*equity*). Yaitu bagaimana biaya dan manfaat didistribusikan merata pada kelompok masyarakat yang berbeda. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha yang secara adil

didistribusikan. Suatu program akan efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pemerataan biaya retribusi sampah sudah di atur berdasarkan Peraturan Walikota No. 56 Tahun 2011 tentang retribusi sampah. Biaya yang dibebankan kepada masyarakat itu di setor di masing-masing kelurahan sebesar Rp.700.000 per bulan, kalau ada lebihnya kita kasih masuk kedalam dana sosial. Setiap masyarakat harus membayar biaya sampah tergantung dari golongannya seperti rumah tangga atau pedagang.

5. Responsivitas (*responsiveness*) yaitu melihat apakah hasil dari sebuah kebijakan program lihat sampah ambil (LISA) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Respon masyarakat terhadap program Walikota di terima oleh masyarakat. Sosialisasi sering dilakukan untuk mengajak warga masyarakat Kota Makassar dengan kalimat pungkutki sampahta kalau kita lihatki (LISA) sehingga masyarakat mulai malu sendiri jika melihat sampah kemudian tidak dipungut.

6. Ketepatan (*appropriateness*) yaitu melihat apakah hasil yang dicapai bermanfaat bagi masyarakat dengan cara mengevaluasi dampak kebijakan yang meliputi efektivitas,

kecukupan, pemerataan, dan responsivitas dan ketepatan pelaksanaan ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa ketepatan dengan cara mengevaluasi Program Lihat Sampah Ambil(LISA) ini dengan melihat atau mengumpulkan apa saja yang di keluhkan oleh masyarakat untuk di evaluasi ke depannya.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya 2 indikator yang dikatakan tidak berhasil dan ada 4 indikator yang dikatakan baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang ada di bawah ini Tabel 6 :

No	Indikator	Keberhasilan Program Lihat Sampah Ambil (LISA)	
		Berhasil	Belum berhasil
1.	Efektivitas	—	√
2.	Efisiensi	√	—
3.	Kecukupan	√	—
4.	Pemerataan	√	—
5.	Responsivitas	—	√
6.	Ketepatan	—	√

8. Pembahasan

Makassar Tidak Rantasa adalah Program dari Pemerintah Kota Makassar salah satunya Program LISA (Lihat Sampah Ambil) untuk mengatasi masalah kebersihan. Program ini dilaksanakan atas surat keputusan Walikota Makassar kepada SKPD dan Kecamatan se-kota Makassar. Menurut Walikota Makassar bapak

Danny Pomanto Program Makassar Tidak Rantasa ini adalah gerakan rekonstruksi moral yaitu dengan merekonstruksi cara pandang masyarakat untuk hidup bersih terutama berkaitan dengan sampah (Badan arsip dan perpustakaan makassar, 2014).

Terdapat dua masalah besar yang dimiliki Kota Makassar jika membahas persampahan yaitu yang pertama masyarakat yang memiliki kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat dan yang kedua adalah manajemen persampahan yang kurang maksimal.

Melihat kondisi di atas maka dukungan masyarakat dalam pelaksanaan Program Makassar Tidak Rantasa untuk mengatasi masalah persampahan ini sangatlah dibutuhkan karena tanpa partisipasi yang lebih dari masyarakat maka program ini tidak bisa terlaksana. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn yaitu: Efektivitas, Efisien, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketetapan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

7. Efektivitas

Menurut Winarno (2002:184) Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian yang dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teori efektivitas dalam William N Dun(2003:429) menjelaskan bahwa "apakah hasil yang diinginkan telah tercapai". Ukuran efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

terpenuhinya sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, menunjukkan pada setiap program harus memiliki jangka waktu atau batasan waktu dalam pencapaian tujuan. Sasaran dari program ini dengan melihat sejauh mana program Lihat Sampah Ambil (LISA) dalam Makassar Tidak Rantasa ini dapat menyelesaikan masalah persampahan yang ada di Kota Makassar. Tujuan dari Program lisa ini untuk merubah pola pikir masyarakat yang harusnya lebih peduli terhadap kebersihan. Program Lihat Sampah Ambil (LISA) dalam Makassar Tidak Rantasa ini tidak dapat berjalan secara efektif tanpa bantuan dari masyarakat. Masyarakat disini sangat berperan penting dalam proses pelaksanaan program LISA ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis bahwa program LISA masih belum sepenuhnya efektif dilaksanakan. Kesadaran akan sampah belum terlaksana dengan sepenuhnya karena masih ada masyarakat yang belum sadar atau tidak peduli akan kebersihan. Hal ini terjadi disebabkan oleh kesadaran individu yang masih kurang dalam menjaga kebersihan. Namun, pihak pemerintah Kecamatan dan Kelurahan terus berupaya mengajak masyarakat dalam hal mensosialisasikan Program LISA untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat yang masih kurang optimal dalam permasalahan sampah. Program Lihat Sampah Ambil (LISA) ini juga tidak memiliki batasan waktu dalam pencapaian tujuan karena kapan saja

dimana saja masyarakat berada kalau lihat sampah ambil .

2. Efisiensi

Menurut Winarno (2002: 185) Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit. Menurut Dunn (2003:430) efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Efisiensi (*efficiency*) yaitu menentukan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai melalui program Lihat Sampah Ambil (LISA) di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Dapat diartikan bahwa efisiensi adalah sejauh mana dapat pencapaian tujuan pada waktu yang tepat, dalam seperti pelaksanaan tugas pokok, maka ukuran efektifitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, selain itu,

menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti dapat dikatakan Program Lihat Sampah Ambil (LISA) dalam Makassar Tidak Rantasa ini salah satu cara Pemerintah Wali Kota Makassar membuat Program LISA untuk memudahkan masyarakat dan hal kebersihan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk menjadi penunjang bagi masyarakat. dan taat akan kebersihan.

3. Kecukupan

Teori Kecukupan dalam William N Dunn mengatakan bahwa "Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah". Kecukupan dalam hal program Lihat Sampah Ambil (LISA) ini kita melihat bagaimana kecukupan dalam hal pengadaan tempat sampah atau pengangkut sampah yang berada di Kecamatan Rappocini. Menurut Winarno (2002: 186) kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti dapat dikatakan Program Lihat Sampah Ambil (LISA) dalam Makassar Tidak Rantasa ini salah satu cara

untuk mengatasi masalah persampahan. Pengadaan tempat sampah dan pengangkut sampah yang berada di Kecamatan Rappocini sudah berjalan dengan baik dimana jam operasi pengangkut sampah sudah mencukupi dan di bagi-bagi, dimana pengangkut sampah yang beroperasi pada sore hari yaitu pengangkut sampah yang menggunakan motor viar dan mobil tongkang sedangkan pengangkut sampah yang beroperasi pada sore sampai malam yaitu pengangkut sampah mobil tangkasa.

Program Lisa ini dulunya di dukung dengan adanya pengadaan tempat sampah gendang dua. Diharapkan masyarakat saat melihat sampah agar memungut sampah tersebut dan membuangnya ditempat sampah gendang dua yang tersedia disekitar jalanan. Namun pada kenyataannya ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan gendang dua yang terbuat dari besi itu untuk di timbang atau di jual untuk kepentingan pribadi.

4. Pemerataan

Teori Pemerataan dalam William N Dunn mengatakan bahwa "apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata keadalam kelompok masyarakat yang berbeda". Biaya retribusi sampah yang dibebankan kepada masyarakat sudah di atur dalam peraturan Walikota No 56 Tahun 2011 tentang wajib retribusi, nilai dan besaran. Setiap masyarakat tidak sama besaran retribusi sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis besaran

retribusi sampah sudah adil dan merata biaya yang dibebankan kepada masyarakat juga tergantung dari tingkat golongan seperti Rumah Tangga, Pedangang atau Restoran. Setiap bulannya ada yang bertugas untuk menangih ke rumah-rumah warga.

5. Responsivitas

Menurut Winarno (2002:189) Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan. Teori Responsivitas dalam William N Dunn mengatakan bahwa “apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan masyarakat” Responsivitas masyarakat dalam Program Lihat Sampah Ambil (LISA) ini di terima baik oleh masyarakat. Tetapi ada juga masyarakat yang belum sadar atau belum mengubah pola pikirnya untuk mengambil sampah apabila melihat sampah. Makassar tidak rantasa dengan program Lihat Sampah Ambil (LISA) tujuannya untuk mendorong masyarakat untuk hidup lebih memperhatikan aspek kebersihan yang tentu dalam tinjauan terkecilnya seperti lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Sebagai satu sistem sosial, masyarakat Kecamatan Rappocini diharapkan bukan hanya sebagai penerima dari kondisi perubahan yang dicanangkan pemerintah

melainkan posisi masyarakat sebagai objek dari perubahan yang ikut andil dan partisipatif sebagai subjek yang melakukan sebuah perubahan.

6. Ketepatan

Teori Ketepatan dalam William N Dunn mengatakan bahwa “Apakah hasil yang dicapai bermanfaat”. Melihat bagaimana hasil yang dicapai tepat sasaran kepada masyarakat dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan dari Program Lisa dalam Makassar Tidak Rantasa.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa setiap program selalu ada evaluasi salah satunya program LISA (Lihat Sampah Ambil) disini kita mengevaluasi program ini semua apa yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Kepala bagian kebersihan Kecamatan Rappocini juga menyediakan stiker yang berisi nomor pengaduan di motor pengangkut sampah. Ketepatan program Lisa ini sangat tepat sasaran kepada masyarakat agar dapat menyadarkan masyarakat supaya lebih memperhatikan kebersihan lingkungan. walaupun masih ada masyarakat yang kurang peduli soal kebersihan.

9. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tentang Evaluasi Program Lihat Sampah Ambil (LISA) dalam Makassar Tidak Rantasa di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dapat ditarik kesimpulan berdasarkan 6 indikator

evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn yaitu Efektifitas, Efisien, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketetapan. Dimana indikator yang peneliti katakan cukup baik yaitu Efisien, Kecukupan, dan Pemerataan, sedangkan indikator yang menurut penulis tidak baik pada indikator Efektifitas, Responsivitas dan Ketepatan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Efektifitas

Masih belum sepenuhnya efektif dilaksanakan. Kesadaran akan sampah belum terlaksana dengan sepenuhnya karena masih ada masyarakat yang belum sadar atau tidak peduli akan kebersihan.

2. Efisiensi

Efisien dalam Program Lihat Sampah Ambil (LISA), untuk

6. Responsivitas masyarakat dalam Program Lihat Sampah Ambil (LISA) ini perlu ditingkatkan lagi, karena masih adanya masyarakat yang belum sadar atau belum mengubah pola pikirnya untuk mengambil sampah apabila melihat sampah.

7. Ketepatan

Ketepatan dalam Program Lihat Sampah Ambil (LISA) dapat dikatakan kurang baik. Karena masih banyak masyarakat belum memahami baik tujuan program. Kepala bagian kebersihan Kecamatan Rappocini hanya menyediakan stiker yang berisi nomor pengaduan di motor pengangkut sampah hal itu kurang di perhatikan masyarakat,

memudahkan masyarakat dan hal kebersihan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk menjadi penunjang bagi masyarakat. dan taat akan kebersihan.

3. kecukupan

Kecukupan dalam Program Lihat Sampah Ambil (LISA), Kecukupan dalam pengadaan tempat sampah dan pengangkut sampah yang berada di Kecamatan Tamalate juga mencukupi, beroperasi pada sore sampai malam yaitu pengangkut sampah mobil tangkasa.

4. Pemerataan

besaran retribusi sampah di Kecamatan Rappocini yang dibebankan kepada masyarakat juga tergantung dari tingkat golongan seperti Rumah Tangga, Pedangang atau Restoran.

5. Responsivitas

b. Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam proses penanganan masalah persampahan di Kota Makassar. hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa yang berperan penting dalam Program LISA ini yaitu masyarakat di bantu dengan Pemerintah dan aparaturnya yang menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan masalah persampahan.

c. Saran

Pemerintah Kota Makassar harusnya lebih aktif dalam mensosialisasikan kegiatan ini kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat untuk mencintai kebersihan dapat terwujud. Misalnya yang kurang (Efektifitas) Perlunya

pihak pemerintahan harus menjadi contoh kepada masyarakat dalam hal menjaga kebersihan. Terus mensosialisasikan program Lihat Sampah Ambil ini agar masyarakat sadar dan merubah pola pikirnya untuk menjaga kebersihan. Mengenai (Responsivitas) Perlunya ada sosialisasi yang dilakukan agar masyarakat sadar dan merubah pola pikir untuk lebih menjaga kebersihan. Ketetapan. Serta (Ketepatan) Mengenai ketetapan program Lisa ini diharapkan mampu memberikan sasaran yang tepat secara menyeluruh bagi masyarakat dan diharapkan setiap kritikan dan saran ditindak lanjuti dengan cepat.

10. Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Solichin. 2016 *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Agus Perwanto Erwan dan Ratih Sulistyastuti Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok. Rajawali Pers
- Dunn William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Gaffar, Karim Abdul. 2011. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irfan Islamy. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Joko Widodo. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Muhlis Madani. 2011. *Dimensi Internal Aktor Dalam Proses Perumusan kebijakan publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Adokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN (Putra Media Nusantara).
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan public untuk Negara-Negara Berkembang Jakarta*: PT. Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2005. *Publik Policy. "Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan"*. Jakarta: Kencana
- Pomanto Moh. Ramadhan & syamsul Rizal. 2014. *8 Jalan Masa Depan; Mainstream Baru Pembangunan Makassar*. Makassar: Pelita Pustaka-

Badan Arsip & Perpustakaan
Makassar.

Suarto, Edi. 2005. *Analisis
Kebijakan Publik*. Bandung:
Alfabeta

Sugiyono. 2018. *Metode penelitian
kuantitatif, kualitatif dan
R&D*. Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan
Publik Teori dan Proses*.
Yogyakarta: Media Presindo.

Jurnal :

Haerul, Haedar Akib, Hamdan. 2016.
Implementasi Kebijakan
Program Makassar Tidak
Rantasa (Mtr) Di Kota
Makassar. Makassar: *Jurnal.
Administrasi Publik*. Vol. 6,
No.2.

Indriyani,Dwi, Lukman. 2015.
Makassar: Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik
Politik Uniersitas

*Perangkat Kerja Daerah(SKPD)
Pelaksanaan Program
Gerakan Makassar Ta' Tidak
Rantasa*

Hasanuddin. Analisis
Pelaksanaan Program
Gerakana Makassar Ta'
Tidak Rantasa Di Kota
Makassar: *Jurnal Ilmu
Pemerintahan*, Vol, 7

Peraturan Perundang Undangan :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2008 tentang pengelolaan
sampah pemerintah daerah
memiliki wewenang untuk
mengelolah sampah di daerah
masing-masing.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Peraturan Daerah Kota Makassar No
4 Tahun 2011 *Tentang
Pengelolaan Sampah*.

Surat Keputusan Nomor
660.2/1087/Kep-/V/2014
*Tentang Pembagian Wilayah
Binaan Satuan*